

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pada Undang-Undang No.1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan pertanggung jawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN DAN APBD. Oleh karena itu pengelolaan dan pertanggung jawaban atas Barang Milik Negara (BMN) tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara.

Dalam Undang-Undang perbendaharaan Negara yang tercantum juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara bahwa yang dikatakan sebagai Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah, di dalam Peraturan Pemerintahan No.6 Tahun 2006 yang termasuk ke dalam BMN diantara lain adalah sumbangan/ hibah, pelaksanaan perjanjian/ kontrak, ketentuan undang-undang dan putusan pengadilan. Penatausahaan BMN dalam hal pengamanan baik fisik, administratif dan hukum perlu adanya sebuah sistem penatausahaan yang dapat mengendalikan (controlling) atas Barang Milik Negara. Sistem yang dirancang khusus dalam hal penatausahaan terhadap BMN adalah aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara ).

Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara ( SIMAK-BMN) apabila diklasifikasikan berdasarkan area fungsional maka akan termasuk dari suatu Sistem Informasi Akuntansi ( Accounting Information System ) yaitu sistem informasi yang menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh fungsi akuntansi (departemen akuntansi). SIMAK BMN adalah sebuah sistem informasi yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, dimana aplikasi sistem tersebut digunakan oleh Satuan Kerja (Satker) milik pemerintah yang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Simak BMN difokuskan kepada hal yang berkaitan dengan penghimpunan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi dalam bentuk Barang Milik Negara. Bentuk dari Barang Milik Negara ( BMN ) meliputi unsur-unsur aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah.

Aktiva tetap merupakan komponen yang sangat penting bagi sebuah perusahaan dalam hal menjalankan kegiatan operasionalnya. Aktiva tetap tersebut merupakan salah satu komponen dalam neraca, sehingga ketelitian dalam pengelolaan aktiva tetap sangat berpengaruh terhadap kewajaran penilaiannya dalam laporan keuangan.

Kewajaran Penilaian Aktiva tetap suatu perusahaan dapat disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 Tahun 2009. Dalam PSAK ini dinyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap dalam pengertian BMN adalah : tanah, peralatan dan mesin,

gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

Aset tetap biasanya memiliki masa pemakaian lebih dari satu tahun, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam jangka waktu yang relatif lama. Namun, manfaat yang diberikan aktiva tetap umumnya semakin lama semakin menurun manfaatnya secara terus menerus, dan menyebabkan terjadi penyusutan (depreciation). Seiring dengan berlalunya waktu, aktiva tetap akan mengalami penyusutan (kecuali tanah). Faktor yang mempengaruhi menurun kemampuan suatu aktiva tetap untuk memberikan jasa/ manfaat yaitu : secara fisik, disebabkan oleh pemakaian dan keausan karena penggunaan yang berlebihan dan secara fungsional, disebabkan oleh kapasitas yang tersedia dengan yang diminta (misal kemajuan teknologi). Sehingga penurunan kemampuan aktiva tetap tersebut dapat dialokasikan sebagai biaya.

Masalah pengalokasian biaya penyusutan merupakan masalah penting, karena mempengaruhi laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Apabila menggunakan metode penyusutan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku atau kondisi perusahaan tersebut, maka akan mempengaruhi pendapatan yang dilaporkan setiap periode akuntansi. Selain itu juga mempengaruhi nilai dari aktiva tetap tersebut.

Akuntansi aset tetap sangat berarti terhadap kelayakan laporan keuangan, kesalahan dalam menilai aset tetap berwujud dapat mengakibatkan kesalahan yang cukup material karena nilai investasi yang ditanamkan pada aset relatif besar.

Pentingnya akuntansi aset tetap dalam laporan keuangan tersebut, maka perlakuannya harus berlandaskan pada Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Akuntansi Aset Tetap (SAP). Aset tetap dalam penyajian laporan keuangan seharusnya membebankan biaya depresiasi yang dimiliki perusahaan secara konsisten pada setiap periode dengan menggunakan metode yang dianggap sesuai untuk diterapkan.

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) penyusutan Barang Milik Negara (BMN) berupa penyusutan aset tetap menurut Peraturan Kementerian Keuangan 1/PMK.06/2013 adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset, yang dilakukan untuk dapat menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintahan pusat. Penghentian pengakuan aset tetap berdasarkan PSAK dan SAP menyatakan bahwa “Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya atau pelepasannya”.

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan menjalankan tugas pemerintah di bidang statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BPS mengambil peranan penting dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga BPS memiliki tanggung jawab terhadap Barang Milik Negara berupa aset tetap dalam kegiatan operasionalnya. Aktiva tetap yang digunakan terdiri dari peralatan dan gedung, kendaraan operasional dan peralatan penunjang lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, melihat pentingnya Barang Milik Negara (BMN) berupa aset tetap pada sebuah perusahaan pemerintah, maka penulis tertarik mengangkat judul tentang **“Akuntansi Barang Milik Negara (Aset) tetap pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis mengangkat permasalahan untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan Akuntansi Barang milik negara (Aset) tetap pada Badan Pusat Statistik Kota Padang?
2. Apa metode penyusutan yang diterapkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Padang terkait Aset tetap yang dimiliki perusahaan?

## 1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Kegiatan Magang

### A. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dilakukan kegiatan magang ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan Akuntansi Barang Milik Negara (Aset) tetap pada Badan Pusat Statistik Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan metode yang digunakan oleh BPS Kota Padang terhadap Aset tetap nya.

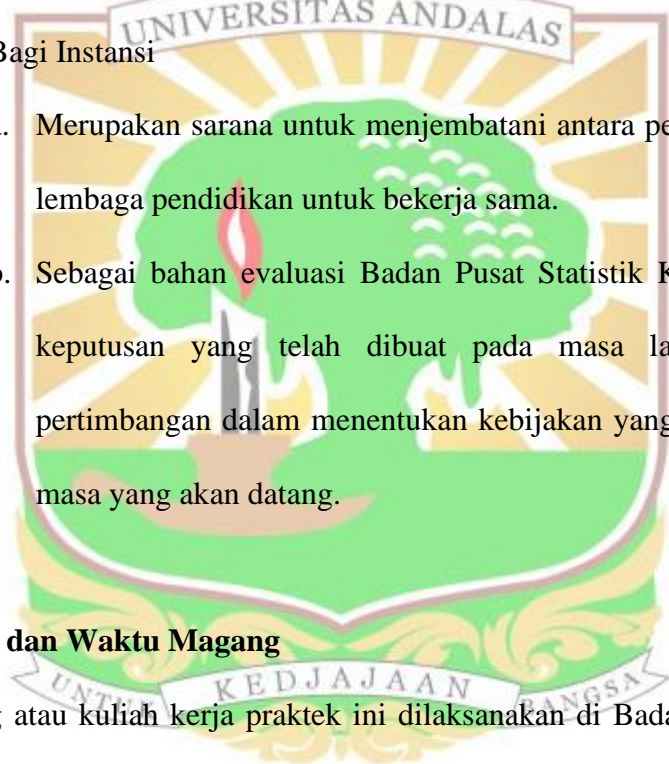
### B. Manfaat Kegiatan Magang

1. Bagi penulis

- a. Dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama magang ke dalam pekerjaan secara nyata setelah lulus dari Universitas Andalas.
- b. Dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam berorganisasi dan bersosialisasi di lingkungan kerja.
- c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi jenjang Diploma III Universitas Andalas.

2. Bagi Instansi

- a. Merupakan sarana untuk menjembatani antara perusahaan dengan lembaga pendidikan untuk bekerja sama.
- b. Sebagai bahan evaluasi Badan Pusat Statistik Kota Padang atas keputusan yang telah dibuat pada masa lalu dan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil di masa yang akan datang.



**1.4 Tempat dan Waktu Magang**

Magang atau kuliah kerja praktek ini dilaksanakan di Badan Pusat Statistik Kota Padang yang beralamat JL. Raya By Pass KM.13, Kel.Sungai Sapih, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25219 selama 40 hari kerja.

**1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan laporan mengenai “Akuntansi Barang Milik Negara (Aset) tetap pada Badan Pusat Statistik Kota Padang” terdiri dari V (lima) Bab, dimana sistematika penulisannya terdiri dari:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang yang mengungkapkan alasan pemilihan topik, rumusan masalah yang merupakan dasar isi dan pembahasan. Tujuan penulisan yang menjawab rumusan masalah, manfaat yang diterima oleh penulis maupun pihak lain dan sistematika pelaporan berisi tentang tugas akhir secara umum.

#### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Menguraikan tentang pengertian Barang Milik Negara (BMN), Kebijakan Akuntansi atas Barang Milik Negara (BMN), pengertian aset tetap, karakteristik aset tetap, klasifikasi aset tetap, perlakuan terhadap aset tetap, dan penyajian aset tetap dalam laporan posisi keuangan.

#### **BAB III: PENGALAMAN MAGANG**

Menguraikan tentang Gambaran Umum Perusahaan tempat dilaksanakan Magang dan hal-hal yang dipelajari selama proses magang di bagian/divisi tempat pelaksanaan magang tersebut.

#### **BAB IV: AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (ASET) TETAP PADA BPS KOTA PADANG**

Menguraikan tentang pembahasan atas rumusan masalah yang diperoleh dari proses selama kegiatan magang berlangsung terkait tentang Akuntansi Barang Milik Negara (Aset) Tetap pada BPS Kota Padang.

## Bab V: PENUTUP

Pembahasan pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran terhadap bab-bab sebelumnya yang dapat dipergunakan nantinya lebih baik di masa yang akan datang.

